

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi komunikasi yang dilakukan antara satu orang dengan yang lainnya. Ketika terjadinya pertukaran informasi, maka terjadilah interaksi yang dapat melahirkan suatu aktivitas. Perusahaan juga memiliki informasi yang dapat mewakili aktivitas terjadinya kegiatan operasi perusahaan. Informasi tersebut tertuang di dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Lubis, Fujianti dan Amyulianthi, 2018) [1]. Berbagai informasi ini digunakan oleh para pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor, karyawan, pemerintah dan pemakai lainnya guna pembuatan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang tinggi. Penyajian integritas laporan yang tinggi dapat diartikan jika laporan keuangan yang disajikan harus bebas dari unsur manipulasi atau mengandung informasi yang akurat. Hal tersebut sangat penting agar para “*stakeholder*” terhindar dari informasi yang menyesatkan, sehingga pengambilan keputusan yang dihasilkan memiliki manfaat terbaik di masa mendatang.

Integritas laporan keuangan erat kaitannya dengan prinsip konservatisme. Secara sederhana, prinsip konservatisme adalah prinsip yang menekankan kehati-hatian dalam melakukan pencatatan akuntansi, yaitu terutama pada pengakuan beban yang harus diakui terlebih dahulu dibandingkan dengan pendapatan, sehingga pendapatan akan diakui apabila sudah terealisasi atau telah memiliki kepastian serta aset bersih akan dinilai dibawah harga pasar sekarang dan dari pada harga perolehan. Konservatisme menurut Soewardjono (2005) dalam Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015) [2] adalah sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculnya (*outcome*) yang terjelek dari kepastian tersebut. Sikap konservatisme juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Menurut Aristiya dan Pratiwi (2014) dalam Sinta (2016) [3] konservatisme dianggap perlu saat digunakan untuk mencegah tindakan manajemen dalam menilai aset perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi. Biasanya manajemen melakukan hal tersebut agar kinerja perusahaan dianggap lebih baik. Selain itu, konservatisme juga dianggap mampu menyelesaikan masalah keagenan yang sering terjadi dalam

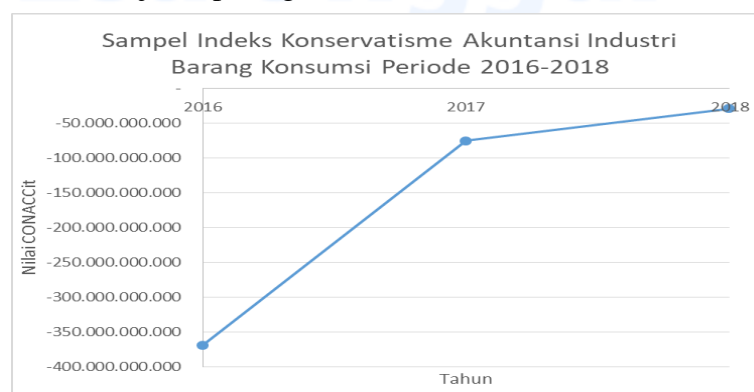
perusahaan, maksudnya adalah menghindari asimetri informasi dengan cara manajemen menyusun laporan keuangan dengan menerapkan akuntansi konservatif yang menghasilkan laba lebih berkualitas. Penerapan prinsip konservatisme ini dapat menghasilkan angka-angka laba yang rendah dan angka-angka biaya yang tinggi. Hal ini dikarenakan prinsip tersebut memperlambat pengakuan pendapatan, tetapi biaya yang terjadi lebih cepat diakui. Akibatnya, laba yang ada dalam laporan keuangan cenderung *understatement* atau terlalu rendah dalam periode sekarang dan *overstatement* terhadap laba pada periode-periode berikutnya (Juanda, 2007 dalam Oktavia, 2016 [4]).

Namun seiring dengan berjalannya waktu, prinsip konservatisme ini menuai banyak pertentangan dalam penerapannya. Para pihak yang menentang konsep konservatisme berpendapat bahwa dengan diterapkannya konsep konservatisme akuntansi dalam menyusun laporan keuangan maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang cenderung bias karena tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Kiryanto dan Edi, 2006 dalam Sinta, 2016 [3]). Selain itu, kritik terhadap konservatisme menyatakan bahwa pada awalnya prinsip ini memang akan menyebabkan laba dan aktiva menjadi rendah, namun akhirnya akan membuat laba dan aktiva menjadi tinggi di masa datang. Hal ini berarti, laba dan aktiva akan menjadi tidak konservatif di masa datang (Sari, 2004) [5]. Namun disisi lain, pihak yang mendukung konsep konservatisme akuntansi dalam menyusun laporan keuangan akan bermanfaat untuk menghindari perilaku *oportunistik* manajer yang hendak memanipulasi laba (Fala, 2007 dalam Sinta, 2016 [3]). Terlepas dari banyaknya perdebatan yang muncul, dengan adanya banyak kasus praktik manipulasi laporan keuangan yang mengindikasikan penerapan konservatisme yang rendah menjadikan perlu adanya prinsip baru yang lebih efektif dibandingkan dengan konsep konservatisme yang telah berjalan.

Pada tahun 2012 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) mulai menerapkan tahap implementasi IFRS secara keseluruhan atau *full adoption*. Adanya konvergensi IFRS terhadap PSAK yang terdapat di Indonesia maka otomatis akan juga berdampak pada perubahan konsep dan metode yang terdapat di Indonesia. IFRS memperkenalkan konsep baru yang disebut dengan *prudence*. Konsep *prudence* yang diperkenalkan berhubungan dengan pengakuan pendapatan, dimana pendapatan boleh diakui meskipun masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) dalam IFRS. Setelah adanya konvergensi ini, maka pengukuran atau penilaian, baik aset maupun *liabilitas* akan menyediakan opsi penilaian dengan *fair value* atau nilai wajar yang lebih luas untuk beberapa item. Penggunaan nilai wajar bertujuan meningkatkan relevansi informasi akuntansi karena menunjukkan nilai terkini. Konsep ini bertentangan dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama (*historical cost*). Hal ini membuat konsep

konservatisme yang sebelumnya berlaku pada SAK dan mengacu pada US GAAP berkurang tingkat penerapannya. Prinsip *prudence* dengan konservatisme memiliki perbedaan mendasar yaitu pada pengakuan pendapatan. Pada prinsip *prudence* pendapatan boleh diakui bila standar dalam pengakuan pendapatan terpenuhi, walaupun realisasinya belum didapatkan. Pada prinsip konservatisme akan mengakui beban terlebih dahulu, baru kemudian mengakui pendapatan.

Saat ini, fenomena penerapan prinsip *prudence* yang diukur menggunakan proksi konservatisme ternyata masih rendah penerapannya. Penghitungan prinsip *prudence* yang diukur dengan proksi konservatisme menggunakan total akrual sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Givoly dan Hayn (2000) dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2004) [5] yang menyatakan jika, konservatisme diukur dengan melihat kecenderungan dari akumulasi akrual selama beberapa tahun. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Apabila terjadi akrual negatif (laba bersih lebih kecil daripada arus kas kegiatan operasi) yang konsisten selama beberapa tahun, maka merupakan indikasi diterapkannya konservatisme. Semakin besar akrual negatif yang diperoleh maka semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Peneliti akan mengambil rata-rata industri barang konsumsi selama periode 2016-2018 yang dijadikan sebagai objek penelitian dan peneliti juga akan mengambil 5 sampel perusahaan selama 5 tahun terakhir untuk mengetahui apakah perusahaan yang terdaftar di industri barang konsumsi (*consumer good industry*) telah menerapkan prinsip *prudence* yang tinggi atau tidak. Perusahaan yang dijadikan sampel untuk dijadikan fenomena adalah PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk. (BUDI), PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. (KAEF), PT. Kedaung Indah Can, Tbk. (KICI), PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. (LMPI), PT. Mustika Ratu, Tbk. (MRAT). Grafik rata-rata industri indeks konservatisme akuntansi dan tabel penghitungan CONACC untuk sampel fenomena penerapan prinsip *prudence* disajikan pada gambar dibawah ini :



Sumber : Data diolah oleh peneliti

Gambar 1.1
Grafik Indeks Konservatisme Akuntansi Rata-Rata Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2018

Sedangkan untuk tabel total akrual perusahaan sampel terpilih industri barang konsumsi dapat dilihat pada data yang disajikan dibawah ini :

Tabel 1.1
Sampel Perusahaan Penerapan Praktik Konservatisme

EMITEN	TAHUN	CONACCit	Keterangan
BUDI	2014	- 81,668,000,000	tidak konservatif
	2015	- 29,595,000,000	tidak konservatif
	2016	134,473,000,000	konservatif
	2017	- 119,975,000,000	tidak konservatif
	2018	- 155,911,000,000	tidak konservatif
KAEF	2014	10,154,263,371	konservatif
	2015	- 138,617,550,651	tidak konservatif
	2016	- 126,770,913,925	tidak konservatif
	2017	- 45,621,331,301	tidak konservatif
	2018	169,911,674,081	konservatif
KICI	2014	- 4,702,292,826	tidak konservatif
	2015	7,882,671,623	konservatif
	2016	- 3,220,784,932	tidak konservatif
	2017	- 4,487,467,778	tidak konservatif
	2018	- 2,446,804,289	tidak konservatif
LMPI	2014	- 14,205,046,666	tidak konservatif
	2015	- 4,157,995,272	tidak konservatif
	2016	- 5,219,680,702	tidak konservatif
	2017	- 2,123,131,650	tidak konservatif
	2018	58,699,677,391	konservatif
MRAT	2014	- 37,844,843,584	tidak konservatif
	2015	- 8,329,785,996	tidak konservatif
	2016	- 16,703,239,911	tidak konservatif
	2017	- 17,047,822,871	tidak konservatif
	2018	- 11,082,080,672	tidak konservatif

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Meskipun tidak terdapat kasus seputar penerapan prinsip *prudence* yang muncul ke permukaan akhir-akhir ini pada perusahaan industri barang konsumsi (*consumer good industry*), namun jika dilihat dari data diatas dapat kita lihat jika grafik rata-rata industry barang konsumsi mengalami kenaikan dari tahun 2016-2018 yang menandakan jika integritas laporan keuangan industry tersebut semakin menguat. Dapat dilihat dari 5 perusahaan yang telah dipilih untuk dijadikan sampel

fenomena penerapan prinsip *prudence* dalam laporan keuangan yang disajikan dalam 5 tahun terakhir hanya PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. (KAEF) yang memiliki presentase penyajian laporan keuangan yang konservatif selama 2 tahun dalam 5 tahun terakhir dibandingkan perusahaan lainnya. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*), karena laporan keuangan yang disajikan kurang menekankan prinsip kehati-hatian (*prudence*). Pentingnya integritas laporan keuangan bagi *stakeholder* semakin menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, karena laporan keuangan adalah sumber informasi yang kompeten bagi para *stakeholder* (Citra, 2013 dalam Lubis *et al.*, 2018 [1]).

Ukuran KAP dapat menjadi tolak ukur kualitas jasa yang diberikan terkait adanya pengaruh dari auditor dalam menentukan laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara jujur atau tidak (Panggabean, 2016 dalam Lubis *et al.*, 2018 [1]). Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu kantor akuntan publik. Ukuran kantor akuntan publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *big four*, mempunyai cabang dan aktivitas operasi di seluruh dunia dan kliennya merupakan perusahaan-perusahaan besar serta memiliki tenaga ahli profesional diatas 25 orang. Sedangkan ukuran kantor akuntan publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Monica dan Wenny, 2015) [6]. Perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik besar dalam memeriksa laporan keuangannya akan membuat laporan keuangan tersebut lebih andal dan jujur, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi (Lubis *et al.*, 2018 [1]). Adapun fenomena yang dapat digunakan untuk membuktikan jika ukuran KAP dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan, dimana seberapa besar peran KAP dalam mempengaruhi klien untuk dapat menerapkan prinsip *prudence*-nya dapat ditunjukkan dari data sampel 5 perusahaan yang telah dipilih untuk mencari fenomena keterkaitan antara ukuran KAP dengan penerapan prinsip *prudence*. Adapun data KAP yang telah memberikan jasa audit terhadap 5 perusahaan yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sampel Perusahaan Pemakai Jasa KAP

EMITEN	TAHUN	KAP	Jenis KAP
BUDI	2014	Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (Moore Stephens)	Non Big Four
	2015	Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (Moore Stephens)	Non Big Four
	2016	Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens)	Non Big Four
	2017	Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens)	Non Big Four
	2018	Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens)	Non Big Four
KAEF	2014	Hendrawinata, Eddy Sidharta & Tanzil (Kreston)	Non Big Four
	2015	Hendrawinata, Eddy Sidharta & Tanzil (Kreston)	Non Big Four
	2016	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Non Big Four
	2017	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Non Big Four
	2018	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Non Big Four
KICI	2014	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade Fatma & Rekan	Non Big Four
	2015	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan	Non Big Four
	2016	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan	Non Big Four
	2017	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Non Big Four
	2018	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Non Big Four
LMPI	2014	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Non Big Four
	2015	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Non Big Four
	2016	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Non Big Four
	2017	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Non Big Four
	2018	Teramihardja, Pradhono & Chandra	Non Big Four
MRAT	2014	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe)	Non Big Four
	2015	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan	Non Big Four
	2016	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan	Non Big Four
	2017	Kanaka, Puradiredja, Suhartono	Non Big Four
	2018	Kanaka, Puradiredja, Suhartono	Non Big Four

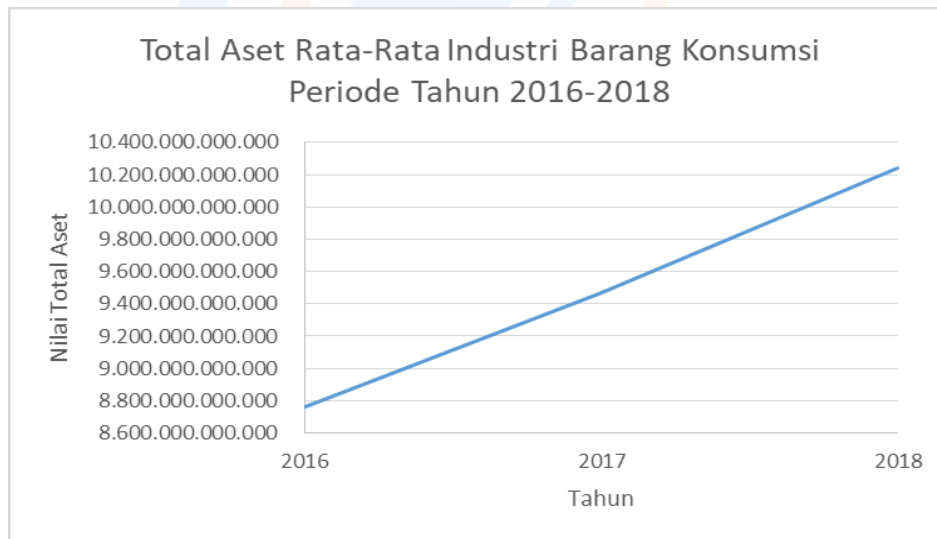
Sumber : Data diolah oleh peneliti

Dapat dilihat dari data diatas yang dijadikan sebagai sampel jika perusahaan yang menggunakan jasa KAP *non big four*, memiliki tingkat *prudence* yang rendah dalam menyajikan laporan keuangannya. Artinya, KAP yang terdapat pada data diatas kurang dapat mempengaruhi tingkat penerapan praktik *prudence* atas perusahaan yang diauditnya. Hasil penelitian Saksakotama dan Cahnyowati (2014) dalam Lubis *et al.* (2018) [1] menyatakan jika, KAP besar merupakan pihak independen yang memberikan sinyal opini bebas lebih andal daripada KAP kecil, sehingga semakin besar KAP, maka kualitas dan integritas laporan keuangan meningkat. Namun hasil Penelitian Astria, 2013 dalam Monica dan Wenny, 2015 [6] menyatakan bahwa pada perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* yang memiliki reputasi baik dan juga mampu melakukan audit secara lebih cepat dan cermat karena memiliki sumber daya manusia yang lebih baik justru memilih

menyajikan laporan keuangan berintegritas rendah. Hasil ini tidak sesuai dengan persepsi KAP *big four* yang seharusnya dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Maka dari itu, dalam penelitian ini digunakan variabel independen ukuran KAP untuk melihat seberapa besar pengaruh ukuran KAP terhadap penerapan prinsip *prudence* yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan. Secara umum, perusahaan yang memakai jasa KAP *big four* dalam mengaudit laporan keuangannya akan menyajikan laporan keuangan yang dimilikinya dengan integritas tinggi. Hal ini dikarenakan, perusahaan akan dituntut untuk *men-disclosure* setiap peristiwa ekonomi dalam aktivitas operasionalnya secara transparan. Hal ini akan berbeda jika perusahaan memakai KAP *non big four* dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, seperti terlihat dari fenomena diatas, yang mana perusahaan akan cenderung menyajikan laporan keuangan yang dimilikinya dengan integritas yang rendah.

Integritas laporan keuangan juga identik dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga identik atas penilaian terhadap besar atau kecilnya suatu perusahaan. Nasution dan Setiawan (2007: 10) dalam Fajaryani (2015) [7], menyatakan bahwa ukuran perusahaan berperan penting dalam penyajian laporan keuangan yang berintegritas. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin menjadi sorotan publik terhadap informasi yang dikeluarkan, sehingga perusahaan akan juga lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangannya. Hal ini akan berbanding terbalik dengan perusahaan kecil, dimana pada perusahaan kecil terdapat kecenderungan untuk menampilkan laporan keuangan dengan kinerja yang baik, agar dapat menarik investor dalam menanamkan modalnya. Ardi Murdoko dan Lana (2007) dalam Verya (2017) [8] mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Fenomena yang akan digunakan untuk membuktikan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan, dimana akan ditunjukkan dengan grafik total asset rata-rata industri barang konsumsi periode 2016-2018 serta akan dibandingkan dengan nilai total asset 5 sampel perusahaan terpilih. Selain itu, nilai total asset 5 sampel perusahaan terpilih akan dibandingkan dengan hasil penghitungan CONNACit (total akrual) untuk mengetahui tingkat penerapan tingkat *prudence* yang dilakukan oleh perusahaan sampel terpilih.

Adapun data ukuran perusahaan yang akan disajikan dalam bentuk grafik dan tabel adalah sebagai berikut :



Sumber : Data diolah oleh peneliti

Gambar 1.2

Grafik Total Aset Rata-Rata Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2018

Sedangkan untuk tabel nilai total aset 5 perusahaan sampel industri barang konsumsi dapat dilihat pada data yang disajikan dibawah ini :

Tabel 1.3

Sampel Ukuran Perusahaan Dilihat dari Total Aset

EMITEN	TAHUN	Total Aset	Keterangan
BUDI	2014	2,476,982,000,000	tidak konservatif
	2015	3,265,953,000,000	tidak konservatif
	2016	2,931,807,000,000	konservatif
	2017	2,939,456,000,000	tidak konservatif
	2018	3,392,980,000,000	tidak konservatif
KAEF	2014	2,968,184,626,297	konservatif
	2015	3,434,879,313,034	tidak konservatif
	2016	4,612,562,541,064	tidak konservatif
	2017	6,096,148,972,534	tidak konservatif
	2018	9,460,427,317,681	konservatif
KICI	2014	100,322,024,001	tidak konservatif
	2015	133,831,888,816	konservatif
	2016	139,809,135,385	tidak konservatif
	2017	149,420,009,884	tidak konservatif
	2018	154,088,747,766	tidak konservatif

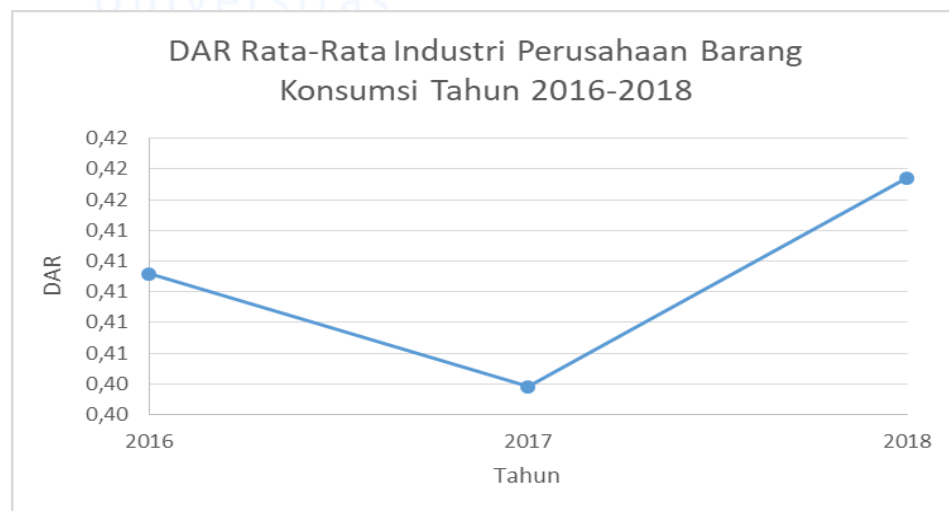
LMPI	2014	808,892,238,344	tidak konservatif
	2015	793,093,512,600	tidak konservatif
	2016	810,364,824,722	tidak konservatif
	2017	834,548,374,286	tidak konservatif
	2018	786,704,752,983	konservatif
MRAT	2014	500,138,658,228	tidak konservatif
	2015	497,090,038,108	tidak konservatif
	2016	483,037,173,864	tidak konservatif
	2017	497,354,419,089	tidak konservatif
	2018	511,887,783,867	tidak konservatif

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Dapat dilihat dari data diatas yang dijadikan sebagai sampel menyatakan jika perusahaan yang mengalami kenaikan total asset maupun yang mengalami fluktuasi total asset masih tetap menerapkan prinsip *prudence* yang rendah, meskipun jika dilihat secara grafik rata-rata industry selama periode 2016-2018 nilai total asset perusahaan di dalam industri barang konsumsi mengalami kenaikan. Maka dengan adanya fenomena ini menunjukkan jika semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin menarik perhatian investor dalam menanamkan modalnya. Namun hal tersebut akan menjadi *boomerang* bagi investor apabila laporan keuangan yang disajikan memiliki integritas yang rendah. Rizkita dan Suzan (2015) dalam Monica dan Wenny (2015) [6] menyatakan jika semakin besar perusahaan, maka akan semakin besar pula kesadaran atau keinginan masyarakat untuk mengakses laporan keuangan tersebut. Hal ini mendorong manajemen perusahaan agar ikut campur dalam pembuatan laporan keuangan dengan tujuan agar perusahaan tersebut dinilai memiliki laporan keuangan yang baik. Namun pada kenyataannya, laporan keuangan tersebut memiliki integritas yang rendah dan tidak dapat di pertanggung-jawabkan. Sedangkan hasil penelitian Fajaryani (2015) [7] menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini digunakan variabel independen ukuran perusahaan untuk melihat seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerapan prinsip *prudence* yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar akan cenderung melaporkan laporan keuangan perusahaannya dengan berintegritas tinggi, karena perusahaan akan cenderung berhati-hati dalam mengeluarkan setiap informasi yang dimilikinya, karena informasi tersebut akan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan investor.

Selanjutnya integritas laporan keuangan juga erat kaitannya dengan rasio *leverage*. Rasio *leverage* erat kaitannya dengan kewajiban yang terdapat di dalam perusahaan. Rasio *leverage* merupakan suatu rasio keuangan yang mengukur

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan membandingkan keseluruhan beban hutang perusahaan terhadap aset atau ekuitasnya. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung untuk kurang *disclosure* laporan keuangan yang dimilikinya sehingga hal ini akan berdampak pada integritas laporan keuangan yang disajikan. Selain itu, dengan tingginya *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan, maka hal ini akan berdampak pula terhadap resiko yang dihadapi oleh investor terkait dengan *return* yang akan diperolehnya. Watts dan Zimmerman (1990: 139) dalam Fajaryani (2015) [7] menyatakan dalam hipotesis utang (*debt covenant hypothesis*) bahwa semakin tinggi utang suatu perusahaan atau semakin dekat perusahaan kearah pelanggaran persyaratan utang yang didasarkan atas angka akuntansi maka manajer akan terdorong untuk menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang rendah melalui pemilihan prosedur-prosedur akuntansi yang memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Namun ternyata bukan hanya investor saja yang memiliki resiko tinggi dalam menghadapi *leverage* perusahaan yang memiliki nilai tinggi. Kreditor sebagai pemberi pinjaman yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya juga memiliki resiko tinggi apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Adapun fenomena untuk membuktikan tingkat *leverage* dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan dimana akan ditunjukkan dengan grafik rasio DAR rata-rata industri barang konsumsi periode 2016-2018 serta akan dibandingkan dengan nilai rasio DAR 5 sampel perusahaan terpilih. Selain itu nilai rasio DAR 5 sampel perusahaan terpilih akan dibandingkan dengan hasil penghitungan CONNACit (total akrual) untuk mengetahui tingkat penerapan tingkat *prudence* yang dilakukan oleh perusahaan sampel terpilih. Adapun data *leverage* yang akan disajikan dalam bentuk grafik dan tabel adalah sebagai berikut :



Sumber : Data diolah oleh peneliti

Gambar 1.3

Grafik Total Aset Rata-Rata Industri Barang Konsumsi Periode 2016-2018

Sedangkan untuk tabel nilai rasio DAR 5 perusahaan sampel industri barang konsumsi dapat dilihat pada data yang disajikan dibawah ini :

Tabel 1.4
Sampel Leverage Perusahaan Dilihat dari DAR

EMITEN	TAHUN	DAR	Kategori DAR
BUDI	2014	0.63	Kecil
	2015	0.66	Kecil
	2016	0.60	Kecil
	2017	0.59	Kecil
	2018	0.64	Kecil
KAEF	2014	0.39	Kecil
	2015	0.40	Kecil
	2016	0.51	Kecil
	2017	0.58	Kecil
	2018	0.65	Kecil
KICI	2014	0.32	Kecil
	2015	0.30	Kecil
	2016	0.36	Kecil
	2017	0.39	Kecil
	2018	0.39	Kecil
LMPI	2014	0.51	Kecil
	2015	0.49	Kecil
	2016	0.50	Kecil
	2017	0.55	Kecil
	2018	0.58	Kecil
MRAT	2014	0.24	Kecil
	2015	0.24	Kecil
	2016	0.24	Kecil
	2017	0.26	Kecil
	2018	0.28	Kecil

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Rasio *leverage* diukur menggunakan rasio DAR dalam penelitian ini. Rasio utang yang bisa kita anggap bagus adalah jika kurang dari 1, yang artinya dapat diketahui jika total aset yang dimiliki perusahaan kurang dari 100% dibiayai oleh hutang dan sisanya dibiayai oleh modal. Apabila jika jumlah hutang terlalu banyak, maka ini juga akan membebani keuangan perusahaan. Dapat dilihat dari data diatas yang dijadikan sebagai sampel menyatakan jika perusahaan yang mengalami kenaikan *leverage* yang diukur melalui rasio DAR maupun yang mengalami

fluktuasi masih tetap menerapkan prinsip *prudence* yang rendah, meskipun jika dilihat secara grafik rata-rata industri selama periode 2016-2018 nilai rasio DAR di dalam industri barang konsumsi mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan. Akibat dari adanya fenomena ini akan menunjukkan jika semakin besar *leverage* perusahaan yang diukur melalui rasio DAR, maka akan semakin menarik perhatian investor maupun kreditor dalam mencermati seberapa besar kontribusi total hutang dalam menciptakan asset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai hutang relatif tinggi akan membuat kreditor mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan karena kreditor berkepentingan terhadap distribusi aktiva bersih dan laba kepada pemegang saham dan manajemen, sehingga kreditor cenderung meminta perusahaan menyelenggarakan akuntansi konservatif agar laba yang disajikan relatif rendah (Yulinda, 2016) [9]. Maka dari itu, dalam penelitian ini digunakan variabel independen *leverage* untuk melihat seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap penerapan prinsip *prudence* yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan sektor yang akan diteliti pada penelitian ini adalah industri manufaktur dan berfokus di sector industri barang konsumsi (*consumer good industry*). Industri barang konsumsi (*consumer good industry*) terdiri atas sub sektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, serta peralatan rumah tangga. Pemilihan industri barang konsumsi (*consumer good industry*) dikarenakan dalam sektor ini yang masih menjadi pilihan utama para investor dalam menginvestasikan dana mereka. Hal ini dikarenakan, saham-saham dari perusahaan-perusahaan dalam industri ini masih menawarkan potensi kenaikan. Produk-produk yang dihasilkan dalam sektor tersebut bersifat konsumtif yang disukai dan dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga para produsen dalam industri ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi yang berdampak pula pada pertumbuhan sektor industri barang konsumsi (*consumer good industry*) ini. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2018, PDB industri manufaktur memberikan kontribusi sebesar Rp2,95 ribu triliun atau sekitar 19,86% dari PDB nasional yang berjumlah Rp14,84 ribu triliun. Adapun nilai investasi dari sektor manufaktur mencapai Rp283,71 triliun atau berkontribusi lebih dari 40% dari total investasi di Indonesia sebesar Rp692,8 triliun. Banyaknya nilai investasi yang masuk dalam sektor ini maka akan membuat para investor jelas memerlukan data laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi agar tidak salah dalam melakukan investasi (kemenperin.go.id) [10]. Namun dengan adanya fenomena-fenomena yang telah dijelaskan diatas dan mengindikasikan masih adanya perusahaan dalam industri barang konsumsi (*consumer good industry*) yang menerapkan prinsip *prudence* yang rendah, hal ini tentunya akan membuat laporan keuangan yang disajikan memiliki integritas yang rendah. Selain itu, dengan adanya penerapan prinsip *prudence* yang rendah yang berakibat dapat mempengaruhi integritas

laporan keuangan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan dan andal. Relevan berbicara bagaimana laporan keuangan yang disajikan harus mencerminkan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan, sedangkan andal artinya laporan keuangan disajikan dengan jujur dan terbebas dari unsur yang menyesatkan. Selain itu, dengan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda pada penelitian sebelumnya (*research gap*) membuat peneliti tertarik untuk mengambil sampel data penelitian dari subsektor ini. Pada akhirnya, dengan adanya fenomena yang muncul terkait dengan rendahnya penerapan prinsip *prudence* dan mempengaruhi integritas laporan keuangan, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Pada Industri Sektor *Consumer Good Industry* yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip *prudence* yang masih rendah pada perusahaan sektor *consumer good industry* sehingga mengakibatkan rendahnya integritas laporan keuangan perusahaan yang akan menimbulkan kerugian bagi para *stakeholder*
2. Masih banyaknya perusahaan yang tidak menggunakan KAP yang bereputasi (*non big four*) yang akan membuat kualitas audit yang diberikan kurang optimal dan mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan
3. Perusahaan industri barang konsumsi masih memiliki nilai total asset yang berfluktuatif tiap tahunnya, sehingga akan dapat mempengaruhi pandangan investor atas ukuran perusahaan.
4. Terdapatnya tingkat *leverage* perusahaan yang diukur dengan rasio DAR yang berfluktuasi tiap tahunnya tidak menjamin dapat mempengaruhi investor maupun kreditor dalam menilai perusahaan apakah mampu melakukan pengelolaan hutang secara maksimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan membahas terlalu jauh untuk menghindari perluasan permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini akan terbatas pada :

- a. Variabel independen :
 1. Ukuran KAP diukur menggunakan variabel dummy, dimana apabila perusahaan menggunakan jasa audit KAP *big four* maka akan diberikan nilai 1, sedangkan apabila perusahaan menggunakan jasa audit laporan keuangan *non big four* maka akan diberikan nilai 0.
 2. Ukuran Perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset (\ln Total Assets).
 3. *Leverage* diukur menggunakan rasio DAR (*Debt to Total Assets Ratio*) untuk mengetahui pengaruh total aktiva terhadap pengelolaan total hutang yang dimiliki oleh perusahaan.

- b. Variabel dependen :
 - a. Integritas laporan keuangan yang diukur dengan menggunakan total akrual sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Givoly dan Hayn (2000).

- c. Data Laporan Keuangan Tahunan periode 2016-2018 sebagai acuan data penelitian.

- d. Studi hanya pada perusahaan industri manufaktur dengan sektor *consumer good industry* yang dipilih dan terdaftar di BEI, serta konsisten dalam mengumumkan laporan keuangan tahunan

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran KAP, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan perusahaan?
4. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan perusahaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor *consumer good industry* yang *listing* di BEI pada tahun 2016-2018.

2. Pengaruh ukuran KAP secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor *consumer good industry* yang *listing* di BEI pada tahun 2016-2018.
3. Pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor *consumer good industry* yang *listing* di BEI pada tahun 2016-2018.
4. Pengaruh *leverage* secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sector *consumer good industry* yang *listing* di BEI pada tahun 2016-2018.

1.6 Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 1. Untuk melengkapi dan memperkaya keilmuan di bidang akuntansi serta teori yang sudah diperoleh melalui penelitian sebelumnya.
 2. Menyajikan suatu wawasan khusus tentang penelitian yang menekankan pada penerapan prinsip *prudence* yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di BEI pada periode 2016 - 2018.
- b. Secara Praktis
 1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan perusahaan tentang pentingnya menyajikan laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi.
 2. Bagi calon investor dan kreditor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, dimana para investor dan kreditor dapat mengetahui dan mengukur integritas laporan keuangan perusahaan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan ekonomi.
 3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya jika ingin dikembangkan lagi secara luas.